

2 Agustus 07

395/28-09-2007

igwal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 890/MENKES/PER/VIII/2007
TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA POLITEKNIK KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan menyiapkan tenaga profesional di bidang kesehatan secara efektif dan efisien perlu dilakukan pengembangan Politeknik Kesehatan;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1192/Menkes/Per/X/2004 tentang Pendirian Diploma Bidang Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan
surat Nomor B/1767/M.PAN/7/2007 Tanggal 18 Juli 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA POLITEKNIK KESEHATAN.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Politeknik Kesehatan yang selanjutnya disebut Poltekkes adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan.
- (2) Poltekkes masing-masing dipimpin oleh seorang Direktur dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan.

Pasal 2

Poltekkes mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan/atau Program Diploma IV sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Poltekkes mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah keahlian di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan profesional dan kesehatan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 4

Poltekkes, terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Pembantu Direktur;
- c. Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi;
- d. Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- e. Senat;
- f. Jurusan;
- g. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- h. Unit Penunjang;
- i. Tenaga Fungsional;
- j. Dewan Penyantun;

Pasal 5

Struktur Organisasi Poltekkes adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I peraturan ini.

Bagian Kedua Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 6

Direktur Poltekkes mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan civitas akademika dan tugas administrasi serta hubungan dengan lingkungan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

Pasal 8

Pembantu Direktur, terdiri dari:

- a. Pembantu Direktur Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
- b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
- c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 9

- (1) Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.
- (3) Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan layanan mahasiswa.

**Bagian Ketiga
Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan,
Perencanaan dan Sistem Informasi**

Pasal 10

Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi adalah unsur pembantu pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh Pembantu Direktur I dan Pembantu Direktur III.

Pasal 11

Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi.

**Bagian Keempat
Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian**

Pasal 12

Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah unsur pembantu pimpinan di bidang umum, keuangan dan kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 13

Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, keuangan dan kepegawaian.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Bagian Kelima
Senat**

Pasal 14

Senat, terdiri dari:

- a. Ketua Senat, yang dijabat oleh Direktur;
- b. Pembantu Direktur;
- c. Ketua Jurusan;
- d. Kelompok Dosen;
- e. Dinas Kesehatan Provinsi setempat;
- f. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan;
- g. Tokoh Masyarakat atau pihak luar yang berkompeten di bidangnya, dalam hal ini mewakili organisasi profesi sesuai dengan bidang studinya pada provinsi setempat.

Pasal 15

(1) Senat mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan Poltekkes;
 - b. merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program pendidikan penelitian dan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - d. memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Poltekkes yang diajukan oleh Pimpinan Poltekkes;
 - e. menilai pertanggungjawaban Pimpinan Poltekkes atas pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur Poltekkes;
 - h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.
- (2) Senat ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai usulan Poltekkes untuk masa kerja 4 (empat) tahun.

**Bagian Keenam
Jurusan**

Pasal 16

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesehatan tertentu.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih diantara Kelompok Dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA.**

- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan yang dipilih diantara Kelompok Dosen.

Pasal 17

- (1) Masing-masing Poltekkes terdiri dari beberapa jurusan yang berasal dari jurusan-jurusan yang tersedia untuk lingkungan Poltekkes.
- (2) Penambahan Jurusan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
- (3) Masing-masing Jurusan dapat mempunyai satu atau beberapa program studi yang sesuai dengan bidang keilmuan serta kebutuhan peningkatan dan pengembangan keahlian.
- (4) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan dari Jurusan dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan.
- (5) Penambahan Program Studi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

**Bagian Ketujuh
Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Pasal 18

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas Poltekkes di bidang penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 19

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian terapan;
- b. pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. peningkatan relevansi program Poltekkes sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- e. pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam maupun dengan luar Poltekkes;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Bagian Kedelapan
Unit Penunjang**

Pasal 21

- (1) Unit Penunjang adalah unit-unit yang secara teknis fungsional diperlukan **sebagai unsur penunjang terselenggaranya kegiatan akademik.**
- (2) Unit Penunjang di lingkungan Poltekkes, meliputi:
 - a. Unit Laboratorium;
 - b. Unit Perpustakaan;
 - c. Unit Komputer;
 - d. Unit Bengkel Kerja;
 - e. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan;
 - f. Unit Asrama.
- (3) Unit Penunjang lainnya dapat dibentuk sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (4) Pembentukan Unit Penunjang lainnya ditetapkan oleh Direktur berdasarkan persetujuan Senat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Unit Laboratorium adalah unit penunjang teknis di bidang laboratorium dari satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan jurusan dan atau program studinya, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional sehari-hari dibina oleh Pembantu Direktur I.
- (2) Unit Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara teknisi/analisis laboratorium senior di lingkungan Unit Laboratorium.

Pasal 23

Unit Laboratorium mempunyai tugas memberikan layanan bahan dan peralatan laboratorium untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Unit Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan dan pengolahan bahan laboratorium;
- b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan laboratorium;
- c. pemeliharaan bahan dan peralatan laboratorium;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha laboratorium.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 25

- (1) Unit Perpustakaan adalah unit penunjang teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional sehari-hari dibina oleh Pembantu Direktur III.
- (2) Unit Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara pustakawan di lingkungan Unit Perpustakaan.

Pasal 26

Unit Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Unit Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka;
- b. pemberian layanan referensi dan pendayagunaan bahan pustaka;
- c. pemeliharaan bahan pustaka;
- d. pengembangan perpustakaan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha perpustakaan.

Pasal 28

- (1) Unit Komputer adalah unit penunjang teknis di bidang pengolahan data dan informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional sehari-hari dibina oleh Pembantu Direktur I dan Pembantu Direktur III.
- (2) Unit Komputer dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara tenaga fungsional teknis/pranata komputer di lingkungan Unit Komputer.

Pasal 29

Unit Komputer mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Unit Komputer menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- b. penyajian dan penyimpanan data dan informasi;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Komputer.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 31

- (1) Unit Bengkel Kerja adalah unit penunjang teknis di bidang bengkel yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional sehari-hari dibina oleh Pembantu Direktur III.
- (2) Unit Bengkel Kerja dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara tenaga fungsional teknis bengkel di lingkungan Unit Bengkel Kerja.

Pasal 32

Unit Bengkel Kerja mempunyai tugas melayani praktik kerja mahasiswa dan/atau memproduksi berbagai jenis barang/jasa sesuai dengan jurusan yang ada di Poltekkes.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Unit Bengkel menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan bahan dan peralatan bengkel;
- b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan bengkel;
- c. produksi berbagai jenis barang/jasa;
- d. pengembangan bengkel kerja;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha bengkel.

Pasal 34

- (1) Unit Pemeliharaan dan Perbaikan adalah unit penunjang teknis di bidang pemeliharaan dan perbaikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional sehari-hari dibina oleh Pembantu Direktur II.
- (2) Unit Pemeliharaan dan Perbaikan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara teknisi di lingkungan Unit Pemeliharaan dan Perbaikan.

Pasal 35

Unit Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana penunjang di lingkungan Politeknik Kesehatan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Unit Pemeliharaan dan Perbaikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perbaikan sarana;
- b. pelaksanaan pemeliharaan sarana;
- c. pemberian layanan perbaikan dan pemeliharaan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pemeliharaan dan Perbaikan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 37

- (1) Unit Asrama mempunyai tugas memberikan pelayanan akomodasi bagi mahasiswa, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional sehari-hari dibina oleh Pembantu Direktur III.
- (2) Unit Asrama dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara staf di lingkungan Unit Asrama.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Unit Asrama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan dan pengelolaan asrama;
- b. pemberian layanan dan pendayagunaan asrama;
- c. pemeliharaan unit asrama;
- d. pengembangan unit asrama;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha asrama.

**BAB III
TENAGA FUNGSIONAL**

Pasal 39

- (1) Tenaga Fungsional adalah tenaga yang diangkat atau bekerja dalam jabatan fungsional sesuai dengan bidang teknis fungsionalnya.
- (2) Kelompok Tenaga Fungsional adalah suatu kesatuan tenaga fungsional yang dikelompokkan sesuai dengan bidang teknisnya.
- (3) Tenaga Fungsional di lingkungan Poltekkes, meliputi:
 - a. Tenaga Fungsional Kependidikan;
 - b. Tenaga Fungsional Penunjang Akademik;
 - c. Tenaga Fungsional Teknisi;
 - d. Tenaga Fungsional di Bidang Administrasi.

Pasal 40

- (1) Kelompok Tenaga Fungsional Kependidikan pada jurusan merupakan kelompok tenaga pengajar yang terdiri dari Dosen dan Tenaga Penunjang Akademik.
- (2) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada Poltekkes.
- (3) Tenaga Penunjang Akademik adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama menunjang kegiatan akademik pada Poltekkes.
- (4) Kelompok Teknisi pada masing-masing unit penunjang terdiri atas sejumlah teknisi dalam jabatan fungsional sesuai dengan pengelompokan bidang teknisnya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (5) Kelompok Tenaga Fungsional Akademik pada Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat terdiri atas sejumlah tenaga teknis akademik/tenaga peneliti dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok program studi.
- (6) Kelompok Tenaga Fungsional dalam bidang Administrasi terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional di bidang administrasi.
- (7) Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk di antara kelompoknya.
- (8) Jumlah tenaga fungsional pada masing-masing unit ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Jenis dan jenjang masing-masing tenaga fungsional diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
DEWAN PENYANTUN**

Pasal 41

- (1) Dewan Penyantun adalah Kelompok Pengarah/Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur kesehatan, unsur pendidikan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi Politeknik Kesehatan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (3) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan atas usul Direktur untuk masa kerja 4 (empat) tahun.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Poltekkes wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Poltekkes maupun dengan instansi lain diluar Poltekkes sesuai tugas masing-masing.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Poltekkes bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 46

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 47

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh semua kepala satuan organisasi yang berada di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap bawahan, wajib mengadakan rapat berkala dengan para bawahan.

**BAB VI
LOKASI**

Pasal 49

- (1) Sejak berlakunya peraturan ini di lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 33 (tiga puluh tiga) Poltekkes.
- (2) Poltekkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencakup Nama Poltekkes, Jurusan dan Lokasi Jurusan terdapat dalam Lampiran II peraturan ini.

**BAB VII
ESELON**

Pasal 50

Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 52

Dengan berlakunya peraturan ini maka:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Malang, Palangkaraya, Surabaya, Banda Aceh, Ambon dan Ternate;
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1049/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penataan Lokasi Pelaksanaan Program Studi Pada Beberapa Jurusan Politeknik Kesehatan Palembang, Tanjung Karang, Bandung, Manado dan Makassar.
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 74/Menkes/SK/II/2004 tentang Program Studi Ortotik Prostetik pada Jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Surakarta.
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 130/Menkes/SK/II/2004 tentang Program Studi Keperawatan Anestesi pada Jurusan Politeknik Kesehatan Jakarta III dan Surabaya.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Tatalaksana dari peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2007



MENTERI KESEHATAN,

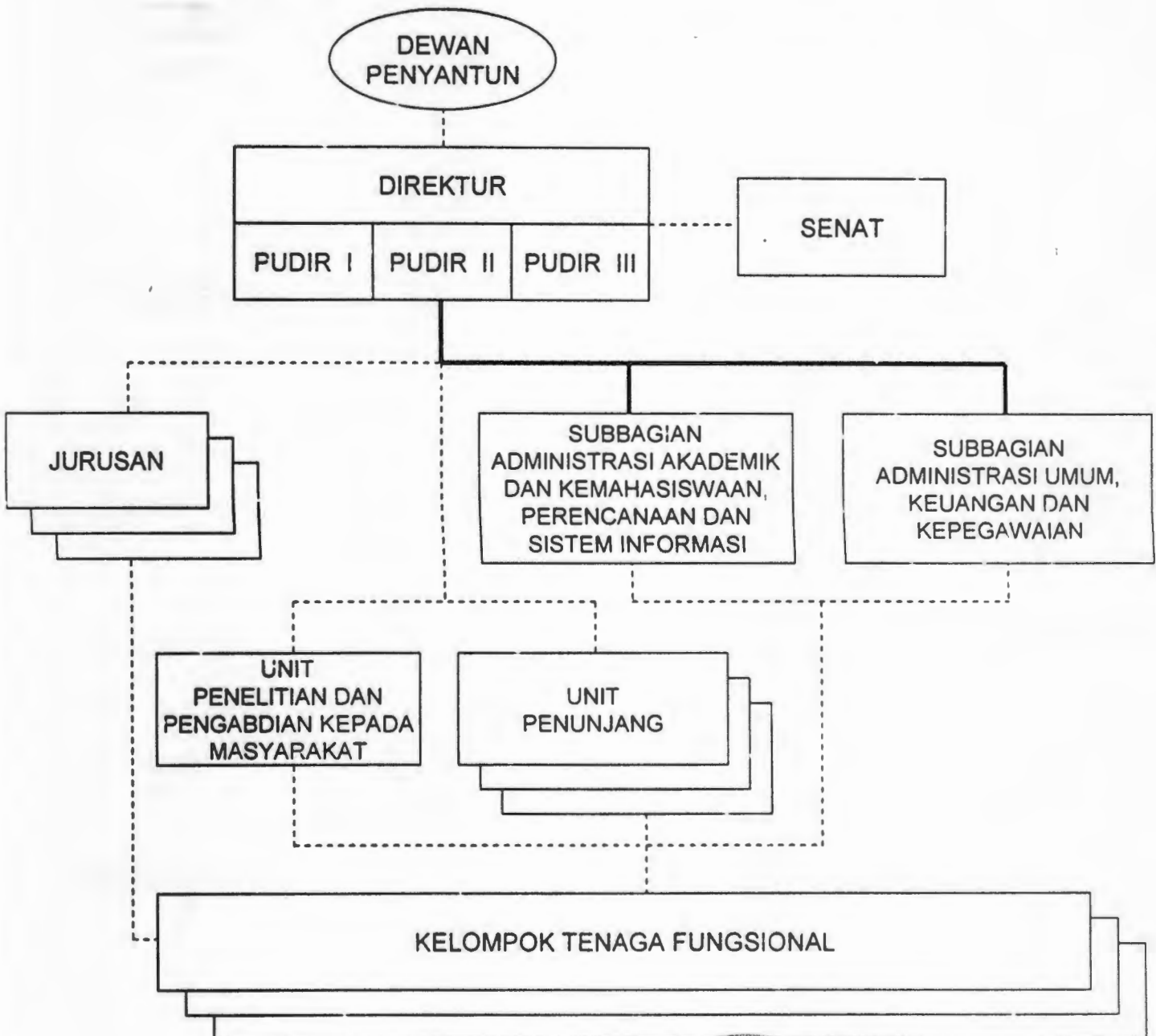
Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 890/Menkes/Per/VIII/2007
TANGGAL : 2 Agustus 2007

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK KESEHATAN



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
Nomor : 890/Menkes/Per/VIII/2007
Tanggal : 2 Agustus 2007

DAFTAR POLITEKNIK KESEHATAN

NO.	NAMA POLTEKKES	JURUSAN	LOKASI
1	2	3	4
1	POLTEKKES DEPKES MEDAN	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Medan
		2. JURUSAN KEBIDANAN	Medan
			Pematang Siantar
			Pdg. Sidempuan
		3. JURUSAN KESEHATAN GIGI	Medan
		4. JURUSAN FARMASI	Medan
		5. JURUSAN ANALIS KESEHATAN	Medan
2	POLTEKKES DEPKES PADANG	6. JURUSAN GIZI	Lubuk Pakam
		7. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Kabanjahe
		1. JURUSAN KEPERAWATAN	Padang
			Solok
		2. JURUSAN KESEHATAN GIGI	Bukittinggi
		3. JURUSAN KEBIDANAN	Padang
			Bukittinggi
3	POLTEKKES DEPKES RIAU	4. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Padang
		5. JURUSAN GIZI	Padang
		1. JURUSAN KEPERAWATAN	Pekanbaru
			Tanjung Pinang
		2. JURUSAN GIZI	Pekanbaru
4	POLTEKKES DEPKES JAMBI	3. JURUSAN KEBIDANAN	Pekanbaru
			Tanjung Pinang
		1. JURUSAN KEPERAWATAN	Jambi
		2. JURUSAN KEBIDANAN	Jambi
5	POLTEKKES DEPKES BENGKULU	3. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Jambi
		4. JURUSAN KESEHATAN GIGI	Jambi
		1. JURUSAN KEPERAWATAN	Bengkulu
6	POLTEKKES DEPKES PALEMBANG		Cirup
		2. JURUSAN GIZI	Bengkulu
		3. JURUSAN KEBIDANAN	Bengkulu
		1. JURUSAN KEPERAWATAN	Palembang
			Batu Raja
			Lubuk Linggau
7	POLTEKKES DEPKES TANJUNG KARANG	2. JURUSAN KEBIDANAN	Palembang
		3. JURUSAN GIZI	Palembang
		4. JURUSAN FARMASI	Palembang
		5. JURUSAN KESEHATAN GIGI	Palembang
		6. JURUSAN ANALIS KESEHATAN	Palembang
		1. JURUSAN KEPERAWATAN	Tanjung Karang
7	POLTEKKES DEPKES TANJUNG KARANG	2. JURUSAN KEBIDANAN	Kota Bumi
			Metro
		3. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Tanjung Karang
		4. JURUSAN KESEHATAN GIGI	Tanjung Karang
		5. JURUSAN ANALIS KESEHATAN	Tanjung Karang
		6. JURUSAN GIZI	Tanjung Karang



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO.	NAMA POLTEKKES	JURUSAN	LOKASI
1	2	3	4
8	POLTEKKES DEPKES DENPASAR	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Denpasar
		2. JURUSAN KEBIDANAN	Denpasar
		3. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Denpasar
		4. JURUSAN KESEHATAN GIGI	Denpasar
		5. JURUSAN GIZI	Denpasar
9	POLTEKKES DEPKES JAKARTA I	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Jl. Wijaya Kusuma Jakarta
		2. JURUSAN KEBIDANAN	Jl. Fatmawati Jakarta
		3. JURUSAN KESEHATAN GIGI	Jl. Lebak Buius Jakarta
10	POLTEKKES DEPKES JAKARTA II	1. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Jl. Hang Jebat III
		2. JURUSAN TEKNIK ELEKROMEDIK	Jl. Hang Jebat III
		3. JURUSAN TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI	Jl. Hang Jebat III
		4. JURUSAN GIZI	Jl. Hang Jebat III
		5. JURUSAN TEKNIK GIGI	Jl. Hang Jebat III
		6. JURUSAN ANALISA FARMASI DAN MAKANAN	Jl. Pasar Minggu
		7. JURUSAN FARMASI	Jl. Percetakan
11	POLTEKKES DEPKES JAKARTA III	1. JURUSAN ANALIS KESEHATAN	Pondok Gede
		2. JURUSAN KEPERAWATAN	Jl. Kimia 17 Jl. Kimia 22 - 24 Jl. Persahabatan
		3. JURUSAN KEBIDANAN	Jl. S. Parman Jl. Pulo Mas
12	POLTEKKES DEPKES BANDUNG	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Bandung Bogor Tangerang
		2. JURUSAN KEBIDANAN	Bandung Bogor Rangkasbitung Karawang
		3. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Bandung
		4. JURUSAN GIZI	Bandung
		5. JURUSAN KESEHATAN GIGI	Bandung
		6. JURUSAN ANALIS KESEHATAN	Bandung
13	POLTEKKES DEPKES TASIKMALAYA	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Tasikmalaya Cirebon
		2. JURUSAN KEBIDANAN	Tasikmalaya Cirebon
		3. JURUSAN KESEHATAN GIGI	Tasikmalaya
14	POLTEKKES DEPKES SEMARANG	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Semarang Purwokerto Pekalongan Blora Magelang
		2. JURUSAN KEBIDANAN	Semarang Magelang Purwokerto
		3. JURUSAN GIZI	Semarang
		4. JURUSAN TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI	Semarang
		5. JURUSAN KESEHATAN GIGI	Semarang
		6. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Purwokerto
15	POLTEKKES DEPKES SURAKARTA	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Surakarta
		2. JURUSAN FISIOTERAPI	Surakarta
		3. JURUSAN ORTHOTIK PROSTHETIK	Surakarta
		4. JURUSAN OKUPASITERAPI	Surakarta



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO.	NAMA POLTEKKES	JURUSAN	LOKASI
1	2	3	4
		5. JURUSAN TERAPI WICARA	Surakarta
		6. JURUSAN KEBIDANAN	Klaten
16	POLTEKKES DEPKES YOGYAKARTA	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Yogyakarta
		2. JURUSAN KEBIDANAN	Yogyakarta
		3. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Yogyakarta
		4. JURUSAN GIZI	Yogyakarta
		5. JURUSAN KESEHATAN GIGI	Yogyakarta
		6. JURUSAN ANALIS KESEHATAN	Yogyakarta
17	POLTEKKES DEPKES MATARAM	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Mataram
			Bima
		2. JURUSAN KEBIDANAN	Mataram
		3. JURUSAN GIZI	Mataram
		4. JURUSAN ANALIS KESEHATAN	Mataram
18	POLTEKKES DEPKES KUPANG	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Kupang
			Ende
			Waingapu
		2. JURUSAN KESEHATAN GIGI	Kupang
		3. JURUSAN KEBIDANAN	Kupang
		4. JURUSAN GIZI	Kupang
		5. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Kupang
		6. JURUSAN FARMASI	Kupang
19	POLTEKKES DEPKES PONTIANAK	1. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Pontianak
		2. JURUSAN GIZI	Pontianak
		3. JURUSAN KESEHATAN GIGI	Pontianak
		4. JURUSAN KEPERAWATAN	Singawang
		5. JURUSAN KEBIDANAN	Pontianak
		6. JURUSAN ANALIS KESEHATAN	Pontianak
20	POLTEKKES DEPKES KALIMANTAN TIMUR	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Samarinda
		2. JURUSAN ANALIS KESEHATAN	Samarinda
		3. JURUSAN KEBIDANAN	Balikpapan
21	POLTEKKES DEPKES BANJARMASIN	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Banjarbaru
		2. JURUSAN KESEHATAN GIGI	Banjarbaru
		3. JURUSAN KEBIDANAN	Banjarmasin
		4. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Banjarbaru
		5. JURUSAN ANALIS KESEHATAN	Banjarbaru
		6. JURUSAN GIZI	Banjarmasin
22	POLTEKKES DEPKES MANADO	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Manado
		2. JURUSAN KESEHATAN GIGI	Manado
		3. JURUSAN KEBIDANAN	Manado
		4. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Manado
		5. JURUSAN GIZI	Manado
		6. JURUSAN FARMASI	Manado
23	POLTEKKES DEPKES PALU	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Palu
			Poso
		2. JURUSAN KEBIDANAN	Palu
		3. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Palu
24	POLTEKKES DEPKES MAKASSAR	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Makassar
			Para-Para
		2. JURUSAN ANALIS KESEHATAN	Makassar
		3. JURUSAN KEBIDANAN	Makassar
		4. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Makassar
		5. JURUSAN GIZI	Makassar



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO.	NAMA POLTEKKES	JURUSAN	LOKASI
1	2	3	4
		6. JURUSAN FARMASI	Makassar
		7. JURUSAN FISIOTERAPI	Makassar
		8. JURUSAN KESEHATAN GIGI	Makassar
25	POLTEKKES DEPKES KENDARI	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Kendari
		2. JURUSAN KEBIDANAN	Kendari
		3. JURUSAN GIZI	Kendari
26	POLTEKKES DEPKES JAYAPURA	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Jayapura
			Sorong
			Manokwari
			Merauke
			Nabire
			Wamena
			Biak
		2. JURUSAN GIZI	Jayapura
		3. JURUSAN KEBIDANAN	Jayapura
		4. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Jayapura
27	POLTEKKES DEPKES MALANG	1. JURUSAN GIZI	Malang
		2. JURUSAN KEPERAWATAN	Malang
			Blitar
			Lawang
		3. JURUSAN KEBIDANAN	Malang
			Kediri
			Jember
28	POLTEKKES DEPKES PALANGKARAYA	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Palangkaraya
		2. JURUSAN GIZI	Palangkaraya
		3. JURUSAN KEBIDANAN	Palangkaraya
29	POLTEKKES DEPKES SURABAYA	1. JURUSAN KESEHATAN GIGI	Surabaya
		2. JURUSAN ANALIS KESEHATAN	Surabaya
		3. JURUSAN KEBIDANAN	Surabaya
			Magetan
			Bangkalan
		4. JURUSAN KEPERAWATAN	Jl. Sutomo 18 A, Surabaya
			Jl. Sutomo 18 C, Surabaya
			Jl. Mayjen. Prof Dr. Moestopo 8C Surabaya
			Sidoarjo
			Tuban
		5. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Surabaya
			Madiun (Magetan)
		6. JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK	Surabaya
30	POLTEKKES DEPKES NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1. JURUSAN KESEHATAN GIGI	Banda Aceh
		2. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Banda Aceh
		3. JURUSAN GIZI	Banda Aceh
		4. JURUSAN KEPERAWATAN	Banda Aceh
			Langsa
			Mculaboh
		5. JURUSAN KEBIDANAN	Banda Aceh
31	POLTEKKES DEPKES MALUKU	1. JURUSAN GIZI	Ambon
		2. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Ambon
		3. JURUSAN KEBIDANAN	Ambon
		4. JURUSAN KEPERAWATAN	Ambon
			Tual
			Masohi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	NAMA POLTEKKES	JURUSAN	LOKASI
1	2	3	4
32	POLTEKKES DEPKES TERNATE	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Ternate
		2. JURUSAN GIZI	Ternate
		2. JURUSAN KEBIDANAN	Ternate
33	POLTEKKES DEPKES GORONTALO	1. JURUSAN KEPERAWATAN	Gorontalo
		2. JURUSAN KEBIDANAN	Gorontalo
		3. JURUSAN GIZI	Gorontalo



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)